



Target Gubernur Tingkatkan SPIP dan APIP di Level 3

PONTIANAK, SP - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar), terus berupaya meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Upaya peningkatan tersebut ditandai dengan adanya kesepakatan de-

ngan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhu HAM), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalbar.

• **Baca Halaman 7**



Suara pemred/giat anshorrohman

PIMPIN RAKOR – Gubernur Kalbar, pimpin Rakor Pemantauan, Inventarisasi Data, dan Permasalahan-Permasalahan di Bidang Pelaksana Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah, yang berlangsung di ruang Data Anlytic Room (DAR) Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (26/2).

Hal 1 ■ target gubernur

Kesepakatan tersebut diwujudkan usai Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantauan, Inventarisasi Data, dan Permasalahan-Permasalahan di Bidang Pelaksana Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah, yang berlangsung di ruang Data Anlytic Room (DAR) Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (26/2).

Menurut Gubernur Kalbar, Sutarmidji, dengan adanya kesepakatan ini, bisa meningkatkan SPIP dan APIP di Level 3.

"Saya berharap dalam kesepakatan ini jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar bisa meningkatkan SPIP dan APIP pada tahun ini semuanya bisa berada di level tiga, untuk kabupaten lainnya sudah berada di level tiga. Target-target capaian kita itu harus bekerja keras tapi saya rasa bisa," ungkap Sutarmidji

Dalam kesepakatan tersebut, tercantum tiga kesepakatan yang telah dibuat diantaranya. Pertama Meningkatkan kualitas matur-

itas SPIP dan Kapabilitas APIP terhadap Pemda yang masih belum mencapai level 3 serta meningkatkan ke level berikutnya.

Kedua membuat Action Plan/Rencana aksi untuk meningkatkan Reformasi Birokrasi di Provinsi Kalbar termasuk kabupaten/kota dalam jangka pendek dan menengah. Ketiga meningkatkan kepatuhan terhadap standar pelayanan penyelenggara sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Sutarmidji menilai untuk saat ini progres pelaksanaan sudah cukup bagus termasuk kapabilitasnya sudah bagus namun harus ditingkatkan guna melayani masyarakat dengan cepat dan transparan.

"Kapabilitas APIP nya juga bagus dan layanan publiknya juga yang lalu ada enam yang disurvei pada zona merah kini tinggal satu saja dan lainnya sudah zona hijau. Saya yakin kalbar bisa berada di level tiga," harapnya. (iat/mul)